

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai objektivitas pemberitaan merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. “Berita dituntut harus objektif namun objektif di sini bukan berarti menampilkan fakta yang benar saja namun juga berarti berita dibuat sesuai kenyataan, tidak berat sebelah, dan bebas dari prasangka” (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2006, p. 54). Memang tidak mungkin untuk bersikap objektif 100% karena berita diproduksi oleh wartawan yang memiliki latar belakang berbeda-beda, namun berita yang ditulis harus diupayakan netral dan tidak memihak (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2006).

Hotman Siahaan, et al. (2001) menuturkan bahwa “tujuan jurnalisme adalah melaporkan kebenaran” (p. 60). Hal ini didukung oleh Kovach dan Rosentiel (2001) yang menyatakan bahwa “kewajiban pertama dari jurnalisme adalah pada kebenaran” (p. 38). Objektivitas menjadi penting karena pers berdiri di tengah-tengah antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan khalayak sebagai konsumen berita sehingga pers dituntut untuk menyampaikan kebenaran secara objektif (Siahaan, et al., 2001).

Sebenarnya telah terjadi perdebatan mengenai masalah objektivitas ini (Siahaan, et al., 2001). John C. Merrill mengatakan jurnalisme yang objektif adalah mustahil karena pada dasarnya semua karya jurnalistik adalah subjektif (dalam Siahaan, et al., 2001, p. 60). Mulai dari proses pencarian, peliputan, penulisan, hingga penyuntingan berita semuanya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektif wartawan (Siahaan, et al., 2001).

Sebaliknya Everette Dennis mengatakan bahwa jurnalisme objektif bukanlah hal yang mustahil. Hal didasarkan pada pemikiran bahwa semua proses kerja jurnalistik sebenarnya dapat diukur dengan nilai-nilai objektif (dalam Siahaan, et al., 200, p. 60). “Misalnya dengan memisahkan fakta dengan opini, menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa, memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta melihat peristiwa dari dua sisi” (Siahaan, et al., 2001, p. 61).

Untuk menengahi perdebatan itu, Siahaan, et al. (2001) memberikan jalan tengah menurut James Boylan. James Boylan mengatakan objektivitas tidak dimaknai sebagai gaya penulisan berita impersonal “yang berimbang” akan tetapi dilihat secara lebih luas, jurnalisme adalah pihak ketiga yang tidak memihak, pihak yang berbicara demi kepentingan umum (dalam Siahaan, et al., 2001, p. 63). “Pendek kata, objektivitas adalah metode yang dipakai untuk menghadirkan suatu gambaran dunia yang sedapat mungkin jujur dan cermat dalam batas-batas praktik jurnalistik” (Siahaan, et al., 2001, p. 63).

Meski secara prinsip media dituntut objektif, pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Media tidak pernah lepas dari pengaruh kelompok dan ideologi dominan (Sudibyo, 2001). Salah satu pengaruh yang besar dalam isi suatu media adalah kepemilikannya (Kansong, 2009). “Jadi kepemilikan media sendiri akan berpengaruh terhadap kebebasan pers” (Kansong, 2009, p. 23). Pemilik media sering kali memiliki kontrol terhadap media dan profesional di dalamnya. Misalnya, pemilik media dapat memerintahkan pekerjanya untuk melarang suatu berita ataupun menerbitkan suatu berita.

Terdapat beberapa contoh mengenai pengaruh kepemilikan media terhadap *content* atau pemberitaan media. Misalnya, yang terjadi pada *Fox TV* milik Rupert Murdoch, di mana Murdoch menghentikan tayangan pelecehan seksual yang dituduhkan pada Clarence Thomas, seorang teman Murdoch yang menjabat sebagai hakim agung (Kansong, 2009). Contoh lain dari kontrol pemilik media terjadi pada SCTV. Sumita Tobing (2000) menjelaskan dalam Nurudin (2009, p. 101) bahwa dirinya pernah mengalami hal ini. Suatu waktu SCTV menyiarkan berita mengenai pemilik *real estate* yang tidak membayar kompensasi pada pemilik tanah, setelah berita tersebut naik, pihak manajemen meneleponnya dengan marah dan memberitahu bahwa pemilik perumahan tersebut adalah pemegang saham SCTV, Sumita Tobing lantas diminta membuat berita lain yang isinya membantah berita sebelumnya (Sumita Tobing, 2000 dalam Nurudin, 2009, p. 101). Kansong (2009) juga menuturkan “kepemilikan media dapat melemahkan fungsi kontrol dari jurnalistik” (p. 27). Misalnya, ketika seorang pemilik media tersandung kasus korupsi maka sangat mungkin media yang dimilikinya tidak akan memberitakan kasus tersebut.

Pada tanggal 23 Desember 2009 lalu, Dahlan Iskan, *CEO Jawa Pos Group* diangkat menjadi direktur utama dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Peristiwa pengangkatan Dahlan muncul dalam berita berjudul “Dahlan Iskan Dipercaya Pemerintah Memimpin PT PLN Gantikan Fahmi Mochtar” yang dimuat di halaman pertama Jawa Pos tanggal 24 Desember 2009. Dalam berita itu, disebutkan bahwa Dahlan menjadi orang luar pertama yang menempati pucuk pimpinan PLN. Pelantikan Dahlan Iskan juga muncul di pemberitaan media lain seperti yang dimuat oleh *Vivanews.com* dalam berita berjudul “Dahlan Iskan, dari Jurnalis Jadi Bos Listrik”. Berita yang dimuat pada hari Rabu 23 Desember 2009 pukul 09.15 WIB tersebut menjelaskan tentang posisi Dahlan Iskan sebagai pendiri dan *CEO Jawa Pos News Network* yang menguasai 130 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia (www.vivanews.com). Kehadiran Dahlan Iskan di PLN sempat mengundang penolakan serikat pekerja PLN, hal itu dimuat dalam berita berjudul “SP PLN Tolak Calon Dirut dari Luar” yang dimuat di *Kompas.com* pada tanggal 11 Desember 2009. Dalam berita yang naik pada pukul 16.41 WIB itu, disebutkan mengenai penolakan serikat pekerja PLN terhadap kehadiran direktur dari luar.

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah dua kali melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat itu berisi tuntutan agar pemerintah tidak memilih direktur utama PLN dari luar lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut (“SP PLN Tolak Calon Dirut dari Luar”, 2009, Desember).

Dalam berita tersebut juga disebutkan “Dahlan Iskan dianggap tidak memahami proses bisnis PLN dan dikhawatirkan penempatannya sebagai Dirut PLN penuh muatan politik” (“SP PLN Tolak Calon Dirut dari Luar”, 2009, Desember).

Kekhawatiran serupa juga muncul di pemberitaan berjudul “Menghitung Ulang Dahlan Iskan” yang dimuat di *Wartanews.com* pada tanggal 22 Juli 2010 pukul 18.16 WIB. Berita tersebut sempat menyatakan bahwa “kenaikan Dahlan sebagai Dirut PLN, dinilai banyak kalangan sarat dengan kepentingan, apalagi Dahlan memiliki label sebagai pemimpin grup Jawa Pos” (“Menghitung Ulang Dahlan Iskan”, 2010, Juli)

Sewaktu Dahlan Iskan naik menjadi direktur utama PLN, salah satu janji yang dia berikan adalah menghentikan listrik padam. Janji tersebut muncul di berita mengenai pelantikan Dahlan Iskan yang berjudul ‘Dahlan Iskan Dipercaya Pemerintah Memimpin PT PLN Gantikan Fahmi Mochtar’ yang dimuat di halaman www.jawapos.co.id pada 24 Desember 2009 lalu.

Dia berharap program itu bisa membantu mengatasi krisis listrik di luar Pulau Jawa. Sebab, kota-kota seperti Tarakan atau Kendari sudah mengalami krisis listrik demikian parah. Padahal, kota tersebut juga bagian dari wilayah Indonesia yang harus disediakan pasokan listriknya. "Di Jawa prioritasnya mencukupi kebutuhan dan keandalannya. Kalau di luar Jawa mengatasi krisis. Itu saja. Tapi, kalau dalam tiga tahun ke depan, kita memang belum bisa jadi *world class company*," tegasnya. (“Dahlan Iskan Dipercaya Pemerintah Memimpin PT PLN Gantikan Fahmi Mochtar”, 2009, Desember)

Isu mengenai listrik padam sebenarnya sudah lama menjadi keluhan seperti yang tertulis di berita berjudul “Pemadaman Listrik Kembali Landa Ibu Kota” yang dimuat di Vivanews.com pada 3 November 2009 pukul 08:10 WIB lalu. Berita tersebut membahas mengenai pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas warga, meskipun yang lebih banyak disorot adalah masalah teknis dalam PLN sebagai penyebab pemadaman. “General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Purnomo Willy, menjelaskan, pemadaman terjadi akibat gangguan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang” (“Pemadaman Listrik Kembali Landa Ibu Kota”, 2009, November). Dalam berita tersebut disebutkan, “Sejumlah kawasan di Jakarta mengalami pemadaman listrik sejak Selasa dini hari, 3 November 2009. Bahkan, hingga pagi ini belum pulih” (“Pemadaman Listrik Kembali Landa Ibu Kota”, 2009, November).

Tidak hanya Vivanews.com, Harian Kompas juga mengeluhkan pemadaman listrik tersebut. Hal itu tercermin dalam berita berjudul “Produktivitas: Pemadaman Listrik Ganggu Industri” yang dimuat di halaman 18 pada tanggal 4 November 2009. Sedikit berbeda dengan berita Vivanews.com, Kompas banyak menyoroti keluhan masyarakat, khususnya kalangan industri

mengenai listrik padam. “Pengusaha onderdil kendaraan bermotor di PIK Pulogadung, Ibnu Purwanto, mengaku terganggu dengan adanya pemadaman listrik. ‘Sampai saat ini kami sudah dua kali terkena pemadaman tanpa pemberitahuan. Kami rugi karena pekerja masuk, tetapi tak berproduksi’ ujarnya” (“Produktivitas: Pemadaman Listrik Ganggu Industri”, 2009, November).

Selain keluhan pengusaha, berita tersebut juga mengutip pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang mengeluhkan listrik padam mengganggu produktivitas industri.

"Saya sedih terhadap kekurangan (daya) listrik belakangan ini karena akan berpengaruh pada keselamatan kerja, produktivitas, dan kinerja. Dalam rapat kabinet sudah disepakati masalah ini akan segera diatasi. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan mengelola hal ini," ujar Muhaimin (“Produktivitas: Pemadaman Listrik Ganggu Industri”, 2009, November).

Salah satu kritik terhadap Fahmi Mochtar (direktur PLN sebelum Dahlan) adalah seringnya listrik padam. Hal ini diungkapkan di *Wartanews.com* dalam berita berjudul “Menghitung Ulang Dahlan Iskan” pada tanggal 22 Juli 2010 pada tanggal 18.16 WIB. Berita tersebut menyatakan “Dahlan Iskan diangkat menjadi Direktur Utama PLN 2009 lalu, menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta” (“Menghitung Ulang Dahlan Iskan”, 2010, Juli).

Menariknya, setelah Dahlan Iskan naik menjadi direktur utama PLN, media masih tetap memberitakan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah, misalnya dalam berita “Listrik Padam, Warga Masohi Serbu Kantor PLN” yang dimuat di *Siwalimanews.com* di tanggal 23 Februari 2010 lalu. Berita tersebut membahas mengenai protes warga Masohi, Maluku terhadap PLN karena listrik padam secara tidak beraturan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga merusak perangkat elektronik milik warga (www.siwalimanews.com).

Ratusan warga yang mendiami kawasan Rumah Rakyat, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Senin (22/2) menyerbu kantor PT PLN (Persero) Ranting Masohi. Penyerbuan tersebut dilakukan akibat pemadaman listrik yang tidak beraturan bahkan tanpa ada pemberitahuan.

"Pemadaman dilakukan sesuka hati PLN sehingga banyak peralatan elektronik yang rusak," ungkap salah seorang warga. ("Listrik Padam, Warga Masohi Serbu Kantor PLN", 2010, Februari)

Berita tersebut berfokus pada keluhan masyarakat Maluku mengenai listrik padam yang melanda wilayah mereka. Berita tersebut menyajikan 2 sub-judul berita mengenai pemadaman listrik di Ambon serta tuntutan lembaga bantuan hukum pada PLN Ambon.

Untuk diketahui, LBH FH Unpatti Ambon resmi menggugat PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Rabu (10/2). Gugatan terkait krisis listrik yang terjadi di Kota Ambon tersebut tercatat dalam daftar gugatan nomor 16/PDT.G/2010/PN Ambon.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ambon akan menduduki kantor PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara di awal bulan Maret mendatang, karena perusahaan tersebut telah membohongi masyarakat Maluku. ("Listrik Padam, Warga Masohi Serbu Kantor PLN", 2010, Februari)

Peristiwa mengenai pemadaman listrik juga muncul dalam berita berjudul "Pelayanan Terganggu: Krisis listrik memusingkan warga" yang dimuat di Harian Kompas edisi Sumatera Bagian Utara edisi 19 Februari 2010 di halaman 26. Berita tersebut lebih banyak menyoroti keluhan warga dan pegawai pemerintah yang tidak bisa menjalankan urusan pelayanan publik seperti pembuatan paspor akibat listrik padam.

Sejumlah pelayanan publik di Kota Medan terganggu lantaran pemadaman listrik yang berlangsung dalam sepekan ini. Alat bantu perkantoran yang menggunakan energi listrik tidak dapat beroperasi. Hal ini menghambat kepentingan masyarakat.

"Banyak berkas yang menumpuk. Kami tidak bisa memprosesnya karena mesin *scanning* tidak dapat dioperasikan, sementara generator listrik milik kami rusak," tutur Kepala Kantor Pelayanan Imigrasi Polonia, Medan, Abdul Rahman, Kamis (18/2) saat ditemui.

A Chin (43), warga Medan, mengaku kecewa dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemadaman listrik menyebabkan pembuatan paspor dua karyawannya menjadi molor. Pembuatan paspor tersebut mestinya selesai dalam waktu empat hari, kini baru selesai sembilan hari. (“Pelayanan Terganggu: Krisis listrik memusingkan warga”, 2010, Februari)

Memang dalam pemberitaan tersebut, juga dibahas penyebab teknis yang mengakibatkan listrik padam. Akan tetapi porsi relatif kecil jika dibandingkan porsi yang diberikan untuk membahas keluhan warga dan pegawai pemerintah. Penjelasan masalah teknis hanya menempati 2 paragraf sementara keluhan pelanggan PLN dimuat dalam 7 paragraf.

Peristiwa pemadaman juga muncul di berita berjudul “Pemadaman Listrik Sering Terjadi Di Pamekasan” yang muncul di halaman *web Antaranews.com*, 3 Agustus 2010 pukul 04:48 WIB. Dalam berita tersebut dijelaskan mengenai pemadaman listrik yang terjadi hingga 5 kali dalam seminggu meskipun dalam cuaca yang baik sekalipun (www.antaranews.com).

“Wartawan ANTARA di Pamekasan melaporkan, sepanjang Minggu (1/8) hingga Senin (2/8) malam, lima kali terjadi pemadaman listrik di sejumlah kecamatan di Pamekasan, yakni Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Tlanakan, Kadur dan Kecamatan Larangan”.

"Sejak sebulan lalu lancar-lancar saja, namun sejak Minggu kemarin malah sering padam tanpa alasan yang jelas," kata Dartiningsih, warga Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Senin malam.

Padahal kata dia, saat listrik padam bukan pada cuaca buruk atau sering turun hujan yang berpotensi kabel putus akibat ada pohon tumbang. "Kalau hujan atau ada angin kencang wajar, mungkin ada kabel yang putus, ini tidak ada apa-apa tiba-tiba padam," katanya.

Hal yang sama juga diakui Dedy Priyanto, warga Kelurahan Kangenan, Kecamatan Kota Pamekasan. Ia menjelaskan, dalam dua hari terakhir ini aliran listrik di rumahnya memang sering padam, tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak PLN. Pada Senin (2/8) aliran listrik di rumahnya mengalami pemadaman mulai pagi hingga siang hari. Dedy menyatakan,

seharusnya pemadaman listrik seperti itu tidak terjadi lagi, karena pemerintah sendiri telah menjanjikan bebas pemadaman listrik bergiliran. "Ketika ada kampanye anti pemadaman, aliran listrik kok malah sering padam," kata Dedy mempertanyakan. Pemadaman listrik yang terjadi di Pamekasan ini bukan hanya dikeluhkan pelanggan di wilayah perkotaan, namun juga para pelanggan listrik di perdesaan, serta para pengusaha warung internet (warnet) di Pamekasan. ("Pemadaman Listrik Sering Terjadi Di Pamekasan", 2010, Agustus)

Berita ini secara umum membahas keluhan warga Pamekasan mengenai pemadaman listrik. Selain itu, berita tersebut juga mempertanyakan pemadaman listrik yang terjadi di tengah-tengah kampanye anti pemadaman yang digencarkan oleh PLN. Berita ini tidak menyajikan konfirmasi dari pihak PLN dengan keterangan pihak PLN tidak dapat dihubungi.

Pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 07.53 WIB, berita mengenai listrik padam juga muncul di halaman *web SurabayaPost.co.id*. Berita berjudul "Di Madiun Listrik Sering Padam" ini membahas mengenai listrik yang padam tanpa alasan di Madiun, selain itu disampaikan juga mengenai frekuensi listrik padam yang sudah dua kali terjadi dalam tiga hari.

Sebagian warga Kota Madiun mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Seperti yang terjadi Senin (9/8) tadi malam listrik padam selama sekitar 90 menit, antara pukul 18.15 hingga 19.45. "Saya jengkel, karena listrik tiba-tiba padam. Menelepon petugas piket gangguan PLN, katanya tak bisa berbuat apa-apa dengan alasan pemadaman itu dari Paiton dan Suralaya atau mana gitu saya agak lupa," ujar Naufal Yusuf, warga Kelurahan Winongo. Petugas menyebutkan pemadaman terjadi di Kelurahan Winongo dan Sogaten (Kec. Manguharjo). Menurut Naufal, petugas di PLN Madiun tak bisa menjelaskan apa penyebab pemadaman. Sehingga petugas di PLN Madiun tak bisa melakukan perbaikan hingga membuat listrik menyala kembali.

Ny Eny Sumarijati juga mengungkapkan kejengkelannya. Tadi malam dia membawa sebagian pekerjaan kantornya untuk dikerjakan di rumah. Namun lampu mendadak padam, tanpa tahu seberapa lama listrik padam. Pada

kesempatan lain, sering juga listrik padam pada saat mencuci menggunakan mesin atau menanak nasi menggunakan listrik

Menurut Naufal, petugas di PLN Madiun tak bisa menjelaskan apa penyebab pemadaman. Sehingga petugas di PLN Madiun tak bisa melakukan perbaikan hingga membuat listrik menyala kembali. (“Di Madiun Listrik Sering Padam”, 2010, Agustus)

Berita di *Surabayapost.co.id* tersebut berfokus pada keluhan masyarakat terhadap listrik padam di wilayah Madiun. Seperti halnya berita di *Antaraneews.com*, berita ini tidak memberikan jawaban dari pihak PLN dan tidak ada keterangan apakah wartawan sudah berupaya menghubungi petugas PLN. Penjelasan yang diberikan petugas PLN mengenai listrik padam ini disampaikan oleh warga yang mengeluhkan pemadaman listrik.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai objektivitas Jawa Pos, umumnya ditemukan hasil bahwa Jawa Pos tidak objektif. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirawan Hengky pada tahun 2009. Dalam penelitian yang berjudul *Objektivitas pemberitaan tragedi Mumbai* pada surat kabar Kompas, Jawa Pos, Suara Pembaharuan, dan Republika itu ditemukan hasil Jawa Pos adalah media yang paling tidak objektif (Hengky, 2009).

Contoh lainnya diberikan oleh Verrel Valerian yang melakukan penelitian tentang objektivitas pemberitaan isu kenaikan harga BBM di surat kabar Kompas dan Jawa Pos di tahun 2009. Hasil analisis isi ini rupanya juga menunjukkan Jawa Pos cenderung tidak objektif yang terlihat dari kecenderungan untuk menggunakan fakta psikologis dan melakukan dramatisasi (Valerian, 2009).

Menariknya, sebelum Dahlan Iskan menjadi direktur utama PLN, Jawa Pos menunjukkan hasil akhir objektif ketika memberitakan masalah listrik padam. Hal ini ditemukan oleh Sinthia Dewi Agustin dalam penelitian mengenai objektivitas pemberitaan pemadaman listrik se-Jawa-Bali di surat kabar Jawa Pos, Kompas, dan Bali *Post* pada tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jawa Pos memberitakan listrik padam secara akurat, tidak memiliki pencampuran fakta dengan opini, sesuai antara judul dengan isi, tidak memiliki dramatisasi, dan *cover both sides* (Agustin, 2009).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui objektivitas pemberitaan Jawa Pos dalam isu listrik padam, sesudah Dahlan Iskan naik menjadi direktur utama PLN. Jawa Pos dipilih karena terdapat faktor kepemilikan Dahlan Iskan. Dalam penelitian ini, akan diteliti berita mengenai listrik padam dengan rentang waktu 5 bulan sesudah Dahlan Iskan naik menjadi direktur utama PLN. Jadi berita yang dipilih adalah berita mengenai pemadaman di bulan Januari 2010 hingga bulan Mei 2010, dengan jumlah berita yang diteliti adalah 27 berita. Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan karena fokus pertama Dahlan Iskan di enam bulan awal masa jabatannya adalah mengatasi listrik padam (Iskan, 2010). Targetnya 30 Juni 2010 listrik padam akan teratasi namun berita mengenai listrik padam hanya muncul di Jawa Pos sampai dengan bulan Mei saja dan tidak ada di bulan Juni 2010.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan objektivitas berita yang dikemukakan J. Westerstahl yang dirinci oleh Dennis McQuail. Jadi penelitian ini akan melihat objektivitas media saat ini. Selain itu penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai objektivitas Jawa Pos dalam berita-berita listrik padam sehingga ke depannya pembaca dapat lebih kritis melihat suatu berita.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah objektivitas Jawa Pos dalam pemberitaan mengenai listrik padam, setelah Dahlan Iskan diangkat menjadi Direktur Utama PLN?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui objektivitas Jawa Pos dalam pemberitaan mengenai listrik padam setelah Dahlan Iskan diangkat menjadi Direktur Utama PLN.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan objek dalam penelitian ini adalah objektivitas pemberitaan media. Sementara batasan subjek adalah berita-berita Jawa Pos mengenai listrik padam sesudah Dahlan Iskan diangkat menjadi direktur utama PLN. Dalam hal

ini, dipilih pemberitaan mengenai listrik padam di bulan Januari 2010 sampai bulan Mei 2010 dengan jumlah berita sebanyak 27 berita.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menampilkan gambaran mendetail dari situasi, *social setting*, atau relasi (Neuman, 2003, p. 30). Dalam penelitian ini, dilakukan sensus yaitu seluruh populasi diamati.

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan objektivitas pemberitaan media oleh Dennis McQuail. Sementara itu manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan pada masyarakat mengenai berita-berita Jawa Pos dalam isu listrik padam sehingga masyarakat dapat bersikap lebih kritis terhadap berita-berita yang ada di media. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi terhadap objektivitas Jawa Pos secara khusus dan bagi industri surat kabar secara umum.

1.6. Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang komunikasi yang melandasi penelitian ini. Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai rumusan masalah yang ingin dijawab lewat penelitian. Selanjutnya, dibahas mengenai tujuan, batasan dalam penelitian, manfaat yang dapat diperoleh, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

2. Kerangka Teori

Di bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori berita, teori objektivitas, dan teori analisis isi. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai nisbah antara konsep dan kerangka berpikir yang digunakan.

3. Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi konseptual dari berita dan objektivitas. Lalu dilanjutkan dengan definisi operasional disertai konstruksi kategori dari objektivitas. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai jenis

penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang dipakai, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

4. Analisis Data

Pada Bab ini, peneliti akan menjelaskan profil Jawa Pos sebagai media yang diteliti. Selanjutnya peneliti akan menampilkan hasil analisis dalam tabel frekuensi dan tabel silang untuk dihubungkan dengan permasalahan yang ada di Bab 1.

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab penutup ini, peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Selain itu, peneliti akan memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil temuan dalam penelitian, baik bagi Jawa Pos maupun bagi penelitian selanjutnya.